



RENCANA KERJA

2026

**DINAS KOPERASI, UKM & PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dapat menyelesaikan Rankir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Satuan (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan Kota Samarinda " **SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU** " Guna mendukung agenda tersebut, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengupayakan terwujudnya pembangunan sektor koperasi, usaha kecil menengah dan industri sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang berdaya saing, maju dan mandiri.

Semoga dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif dan se-efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Samarinda, Agustus 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1960F-2025-16-60-100-14



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	50
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	61
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	64
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	65
3.3. Program dan Kegiatan	66
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	87
BAB 5 PENUTUP	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra OPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan



dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal OPD.
2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 dan mengacu pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2026. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kota Samarinda. Program dan kegiatan



dalam Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Samarinda.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu



menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Koperasi, UKM dan Industri di Kota Samarinda dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Samarinda.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi



- Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Konkuran Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3)
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
27. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tunas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Samarinda;
28. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/386/HK-KS/III/2022 tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/177/HK-KS/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah



Kota Samarinda Tahun 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Koperasi, UKM dan Dinas Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 1 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang baru, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang diprioritaskan dan dimantapkan dalam pembangunan Koperasi, UKM dan Industri secara berkesinambungan diantaranya : Meningkatkan peran Koperasi, UKM dan Industri dalam perekonomian, serta pengembangan UKM/IKM dalam penciptaan 10.000 wirausaha baru sehingga tercipta lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas. Untuk itu, pembangunan Koperasi, UKM dan Industri sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, arah kebijakan tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) setiap tahunnya, untuk itu maka disusunlah RENJA-OPD Tahun 2026 ini, untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 dalam program dan kegiatan. Selanjutnya, RENJA-OPD Tahun 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RENSTRA-OPD dan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang akan memuat visi, misi, dan program dari Kepala Daerah terpilih. RENJA-OPD diperinci dalam RKA-OPD yang memuat pendapatan belanja SKPD lebih detail.



2. TUJUAN

Perumusan RENJA-SKPD dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya memperhatikan hasil MUSRENBANG, responsif terhadap permasalahan dan isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kebutuhan SKPD saja melainkan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Industri. Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda selama tahun 2024 Tahun berjalan 2025, dan proyeksi Tahun 2026.

Pembangunan sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai motor penggerak perekonomian akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan.

1. Sektor Koperasi dan UKM

Sektor Koperasi dan UKM merupakan sektor yang sangat mendukung dalam upaya keberhasilan program unggulan pemerintah kota samarinda yaitu Badan Usaha Milik RT (Bebasis Kelurahan) dan Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM melalui penyuluhan, bimtek/diklat, fasilitasi dan pendampingan bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru dengan kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perkoperasian menuju koperasi sehat, sehingga diharapkan satu RT akan memiliki minimal dua wirausaha baru dan badan usaha berbentuk koperasi.

Pertumbuhan koperasi dan peningkatan koperasi sehat akan mampu mewujudkan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, hal ini selaras dengan misi Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2020 – 2024.

Perkembangan koperasi dan UKM dapat dilihat dari indikator sebagai



berikut, koperasi pada tahun 2022 sebanyak 1.339 unit usaha, tahun 2023 sebanyak 1.345 unit usaha dan tahun 2024 sebanyak 1.368 unit usaha, sementara perkembangan usaha kecil menengah pada tahun 2022 sebanyak 43.431 orang, tahun 2023 sebanyak 45.001 orang dan tahun 2024 sebanyak 50.288 orang.

2. Sektor Industri

Sektor Industri telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kota Samarinda. Untuk itu peran Industri dalam perekonomian dan Pengembangan Industri kecil termasuk Industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta Pengembangan Industri pengolahan dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor Industri haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan industri yang optimal didukung oleh peningkatan dan pengembangan sentra-sentra dan kawasan peruntukan industri, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 106 ayat 1 yang menyebutkan perusahaan industri yang akan menjalankan industri, wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri, yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda.

Kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan indikator antara lain unit usaha industri tahun 2022 sebanyak 3.171 unit usaha, tahun 2023 sebanyak 3.467 unit usaha, dan tahun 2024 sebanyak 3.787 unit usaha. Nilai investasi sektor industri pada tahun 2022 mencapai Rp. 636.053.618.412,- ; pada tahun 2023 mencapai Rp. 667.133.244.312,-; dan pada tahun 2024 mencapai Rp. 702.075.716.312,- Tenaga kerja yang terserap di sektor industri juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 13.997 orang, pada tahun 2023 menjadi 16.221 orang, dan pada tahun 2024 menjadi 18.634 orang.



Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tahun 2024 dan Capaian Renstra tersaji dalam tabel 2.1.



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)						
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
											6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
2	17	02	2	01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	2.265 Koperasi	198	40	15	37,50	353	282	80
2	17	02	2	01	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan	2.165 Unit usaha	198	20	15	75,50	383	306	80



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)					
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
											6	7	8=(7/6)	9
2	17	02	2											
2	17	02	2	0001	Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Cabang Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	100 Unit Usaha	-	20	20	100	20	20	100
2	17	02	2	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	100 Unit Usaha	-	20	20	100	20	20	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
											6
		wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota									
2	17	03									
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	64,85 Persen	19	19,97	17,79	89,11	46,83	20	60



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 17 03 2 01	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	2.881 Koperasi	421	248	221	89,11	713	451	63
2 17 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1.296 Unit Usaha	290	124	121	97,58	496	300	60
2 17 03 2 01 0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan	Jumlah Koperasi	1.585 Unit usaha	131	124	100	80,65	217	151	70



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)						
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
											6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
2	17	04	2	01	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	1.250 Unit usaha	165	30	29	96,67	200	100	50
2	17	04	2	01	0003	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	125 Unit usaha	-	25	25	100	25	20	80
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	100 Persen	100	19,32	12,16	62,92	100	100	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
											6
		Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	1.500 Orang	316	240	176	73,33	300	-	-
		Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (DAK NON FISIK)	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	1.500 Orang	199	240	176	99,95	300	300	100
		Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM	Orang	76	76	76	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	SDM UKM (DAK NON FISIK)									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	73,19 Persen	16,58	28,66	20,13	70,22	24,17		
	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	2.380 Orang	144	356	250	70,22	256	204	80
	Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi ushaa	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1.780 Orang	144	356	250	70,22	256	204	80



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	koperasi kewenangan kabupaten/kota									
	Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	600 Keluarga	-	-	-	-	600	420	70



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	90 Persen	41	27,32	7,34	26,89	52	41	78
	Kegiatan Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	53.059 Unit Usaha	7.821	8610	2315	26,89	7.510	4755	63
	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	12.500 Unit usaha	996	2500	144	5,76	1.500	750	50



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
											6
		Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	4.500 Unit usaha	140	875	165	18,86	400	200	50
		Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	8.695 Unit usaha	316	1785	165	9,24	810	405	50
		Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para	7.000 Orang	250	1400	566	40,43	800	400	50



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro								
	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			2000	1275	63,75			
	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kopetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan.	200 Orang	-	50	52	104,00	50	50	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang	2 Persen	2	1,27	0,46	36,00	2	2	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Peringkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		diberikan dukungan fasilitasi pemasaran								
	Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	1.980 Unit Usaha	229	400	144	36,00	436	218	50
	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			360	144	36,00			
	Sub kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi.	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan	1.980 Unit usaha	229	40	40	100	436	218	50



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota								
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perwilayah an industri								
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan prasarana industri								
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pelaku usaha Industri yang diawasi	1.475 Pelaku Usaha Industri	250	285	285	100	275	250	90
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin	Pelaku usaha	1.475 Pelaku	250	285	285	100	275	250	90



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Industri yang diawasi	Usaha Industri							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan Industri	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha								



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	29 Pelaku IKM	5	6	103	1716,67	5	5	100
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Industri	25 Dokumen	1	6	103	1716,67	5	5	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan,	Jumlah Dokumen	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Infromasi Industri Nasional (SIINas)	Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa	Jumlah Dokumen Hasil	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas								
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	25 Dokumen	1	1	1	100	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	84 Nilai	-	80	85,05	106,31	80		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	31 Nilai	7	69	65,37	94,74	5	5	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	31 Dokumen	5	5	5	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian	5 Laporan	1	1	1	100	1	1	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Dokumen	12	13	13	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	77 Orang/Bln	77	45	45	100	77	77	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	39 Dokumen	21	40	40	100	39	21	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	35 Laporan	7	7	7	100	7	7	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 Persen	100	13	13	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunnann kantor yang disediakan	6 Paket	2	2	2	100	2	2	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	9 Paket	5	2	2	100	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		n kantor yang disediakan								
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	5	5	5	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 Paket	4	4	4	100	4	4	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	189 Laporan	-	3	3	8	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah laporan penyelengg	5 Laporan	-	37	37	100	1	1	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi SKPD								
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	13 Laporan	13	13	13	100	13	13	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	45 Unit	-	2	-	-	9	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	13 Dokumen	13	13	13	100	13	13	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	82 Laporan	82	82	82	100	82	82	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		daya air dan listrik yang disediakan								
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	47 Laporan	5	9	9	100	5	5	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pemeliharaan	13 Laporan	-	13	13	100	13	13	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	10 Unit	2	2	2	100	2	2	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dipelihara dan dibayarkan pajaknya								
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	-	2	2	100	15	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	2	2	2	100	2	2	100



Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (%)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun 2025	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 Unit	-	3	3	100	3	3	100



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tunas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian didukung dengan sumber daya dan sarana prasarana.

Jumlah pegawai pada tahun 2025 sebanyak 91 orang terdiri dari PNS sebanyak 67 Orang dan Non PNS Terdiri dari 24 Orang. Berdasarkan Analisis Jabatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda maka Estimasi kebutuhan pegawai yang dibutuhkan di masing-masing bidang dan sub bagian sekitar 13 Orang. Oleh karena itu Jumlah Pegawai yang diinginkan sampai dengan Tahun 2026 dengan total keseluruhan 122 orang. Selain dibutuhkan dari segi jumlah pegawai peningkatan kapasitas aparatur untuk tenaga teknis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda juga tidak kalah penting guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sampai tahun 2025 serta sarana prasarana yang diinginkan sampai dengan Tahun 2026. Untuk tahun 2026 dalam peningkatan sarana dan prasarana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memprioritaskan pada peralatan pendukung pelayanan masyarakat dalam pemenuhan pemberian izin / rekomendasi di Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian, serta Peralatan pendukung penyediaan Data/Sistem Informasi berbasis database/website serta perangkat administrasi lainnya.

Jumlah Koperasi pada tahun 2024 tercatat 1.368 koperasi, dengan rician sebagai berikut; koperasi aktif berjumlah 378 koperasi, koperasi tidak aktif sebanyak 993 koperasi, Koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 69 koperasi dan Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berjumlah 91 koperasi.



Jumlah Pelaku Usaha pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebagai berikut; Pelaku Usaha tahun 2023 berjumlah 45.001 unit usaha, dan tahun 2024 berjumlah 50.288 pelaku usaha, sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 5,287 pelaku usaha.

Industri di Kota Samarinda mengalami peningkatan dari unit usaha industri, tenaga kerja yang di butuhkan dan investasi industri, peningkatan itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah IKM dari tahun 2023 sejumlah 3.467 unit usaha industri, menggunakan 16.221 orang tenaga kerja dan investasi sebesar Rp. 667.133.244.312,- sampai dengan tahun 2024 meningkat menjadi 3.787 unit usaha industri dan menggunakan 18.634 orang tenaga kerja dengan nilai investasi Rp. 702.705.716.312,-.

Sehingga secara keseluruhan hasil analisis kinerja pelayanan Dinas tersaji dalam tabel 2.2



TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
I	Urusan Koperasi dan UKM										
1	Peningkatan Koperasi Sehat	Koperasi	14	15	16	17	14	15	16	17	
2	Peningkatan pelaku kewirausahaan	Unit usaha	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
II	Urusan Perindustrian										
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	8,20	7,48	7,49	7,50	8,10	8,20	7,49	7,50	



2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda antara lain adalah perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perindustrian sesuai dengan RJPMD yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah :

1. Terbatasnya Jumlah Aparatur Pembina
2. Terbatasnya Kemampuan manajerial Pengurus Koperasi, UMKM dan IKM, Banyak Koperasi, UMKM dan IKM yang belum dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan.
3. Masih terbatasnya akses permodalan bagi UMKM dan IKM
4. Pemasaran produk Koperasi, UMKM dan IKM masih sebatas pasar lokal
5. Masih terbatasnya SDM koperasi, UMKM dan IKM dalam pengetahuan teknologi dan informasi
6. Rendahnya daya saing Koperasi dan, UMKM dan IKM dalam memasuki pasar global

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Sesuai dengan rancangan awal RKP Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2026, jumlah alokasi pagu Indikator Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 5.385.666.244.564,- (Lima Trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Lima MilyarEnam Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) untuk 32 urusan yang terdiri atas 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 15 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, dan 6 urusan penunjang pemerintahan.



Jumlah pagu indikatif Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian pada RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2026 sebesar Rp. 21.933.787.056,- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah). Review terhadap rancangan awal RKPD 2026 disajikan dalam tabel berikut:



TABEL 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Samarinda

OPD : DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Samarinda	IKM	83.50 Indeks	21,585,583,270	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Samarinda	IKM	83.50 Indeks	21,585,583,270	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	65 Nilai	271,600,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	65 Nilai	271,600,000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dokumen	150,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dokumen	150,000,000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	50,000,000	
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	50,000,000	
1.1.8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket	50,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket	50,000,000	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan	13 Laporan	11,881,933,270	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan	13 Laporan	11,881,933,270	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	10,533,804,270	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	10,533,804,270	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	40 Dokumen	1,268,129,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	40 Dokumen	1,268,129,000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	80,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	80,000,000	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Pegawai	97 Orang	333,050,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Pegawai	97 Orang	333,050,000	
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	97 Paket	63,050,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	97 Paket	63,050,000	
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	100,000,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	100,000,000	
1.3.3	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	20,000,000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	20,000,000	
1.3.4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	150,000,000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	150,000,000	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan	13 Laporan	1,212,000,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan	13 Laporan	1,212,000,000	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	15,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	15,000,000	
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	750,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	750,000,000	
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	50,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	50,000,000	
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 Paket	40,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 Paket	40,000,000	
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	32,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	32,000,000	
1.4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	10,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	10,000,000	
1.4.7	Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	Samarinda	Jumlah paket/bahan material yang disediakan	2 Paket	50,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	Samarinda	Jumlah paket/bahan material yang disediakan	2 Paket	50,000,000	
1.4.8	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	3 Laporan	15,000,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	3 Laporan	15,000,000	
1.4.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	250,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	250,000,000	
1.4.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 Dokumen	50,000,000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	13 Laporan	2,168,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	13 Laporan	2,168,000,000	
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 Unit	168,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 Unit	168,000,000	
1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	300,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	300,000,000	
1.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Unit	300,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Unit	300,000,000	
1.5.4	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	100,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	100,000,000	
1.5.5	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit	100,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit	100,000,000	
1.5.6	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	1,000,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	1,000,000,000	
1.5.7	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	200,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	200,000,000	
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	13 Laporan	2,444,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	13 Laporan	2,444,000,000	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	82 Laporan	800,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	82 Laporan	800,000,000	
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Laporan	84,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Laporan	84,000,000	
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Laporan	1,560,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Laporan	1,560,000,000	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan pemeliharaan	13 Laporan	3,275,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan pemeliharaan	13 Laporan	3,275,000,000	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	260,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	260,000,000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	250,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	250,000,000	
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Samarinda	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	2 Unit	100,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Samarinda	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	2 Unit	100,000,000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit	250,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit	250,000,000	
1.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Samarinda	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Unit	100,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Samarinda	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Unit	100,000,000	
1.7.6	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit	15,000,000	
1.7.7	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	2,000,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	2,000,000,000	
1.7.8	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	
1.7.9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Samarinda	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	2.12 Persen	175,000,000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Samarinda	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	2.12 Persen	175,000,000	
2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Samarinda	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	8 Koperasi	175,000,000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Samarinda	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	8 Koperasi	175,000,000	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8 Koperasi	175,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8 Koperasi	175,000,000	
2.2	Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah Cabang Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	0	-	Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah Cabang Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	0	-	
2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Samarinda	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	19.91 Persen	410,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Samarinda	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	19.91 Persen	410,000,000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	258 Koperasi	410,000,000	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	258 Koperasi	410,000,000	
3.1.1	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Samarinda	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	129 Unit Usaha	210,000,000	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Samarinda	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	129 Unit Usaha	210,000,000	
3.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	129 Unit Usaha	200,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	129 Unit Usaha	200,000,000	
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Samarinda	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	9.52 Persen	425,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Samarinda	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	9.52 Persen	425,000,000	
4.1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	36 Koperasi	425,000,000	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	36 Koperasi	425,000,000	
4.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	18 Unit Usaha	225,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	18 Unit Usaha	225,000,000	
4.1.2	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Samarinda	Jumlah Koperasi yang Dibenikan Penilaian Kesehatan	18 Unit Usaha	200,000,000	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Samarinda	Jumlah Koperasi yang Dibenikan Penilaian Kesehatan	18 Unit Usaha	200,000,000	
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Samarinda	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	19.84 Persen	400,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Samarinda	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	19.84 Persen	400,000,000	
5.1	Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	75 Orang	400,000,000	Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	75 Orang	400,000,000	
5.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Samarinda	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	400,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Samarinda	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	400,000,000	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Samarinda	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	19.98	1,502,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Samarinda	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	19.98	1,502,000,000	
6.1	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	259 Orang	1,502,000,000	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Samarinda	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	259 Orang	1,502,000,000	
6.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	50 Unit Usaha	276,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	50 Unit Usaha	276,000,000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Samarinda	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha	500,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Samarinda	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha	500,000,000	
6.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	50 Unit Usaha	276,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	50 Unit Usaha	276,000,000	
6.1.4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	59 Unit Usaha	450,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	59 Unit Usaha	450,000,000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Samarinda	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	5.27 Persen	2,900,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Samarinda	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	5.27 Persen	2,900,000,000	
7.1	Kegiatan Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	2,650 Unit Usaha	2,900,000,000	Kegiatan Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	2,650 Unit Usaha	2,900,000,000	
7.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	Samarinda	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	300 Unit Usaha	300,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	Samarinda	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	300 Unit Usaha	300,000,000	
7.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Samarinda	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	300 Unit Usaha	250,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Samarinda	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	300 Unit Usaha	250,000,000	
7.1.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	Samarinda	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	300 Unit Usaha	200,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	Samarinda	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	300 Unit Usaha	200,000,000	
7.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Samarinda	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	300 Orang	250,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Samarinda	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	300 Orang	250,000,000	
7.1.5	Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemantauan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	150,000,000	Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemantauan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	150,000,000	
7.1.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	100 Unit Usaha	200,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	100 Unit Usaha	200,000,000	
7.1.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	150,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	150,000,000	
7.1.8	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	1,000,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	1,000,000,000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.1.9	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Samarinda	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1,000 Unit Usaha	300,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Samarinda	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1,000 Unit Usaha	300,000,000	
7.1.10	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	100,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	100,000,000	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Samarinda	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.72 Persen	2,350,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Samarinda	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.72 Persen	2,350,000,000	
8.1	Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	360 Unit Usaha	2,350,000,000	Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	360 Unit Usaha	2,350,000,000	
8.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	1,500,000,000	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	1,500,000,000	
8.1.2	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Samarinda	Jumlah yang Difasilitasi	50 Orang	250,000,000	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Samarinda	Jumlah yang Difasilitasi	50 Orang	250,000,000	
8.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	100,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Samarinda	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	100,000,000	
8.1.4	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Samarinda	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	500,000,000	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Samarinda	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	500,000,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Samarinda	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	4.46 Persen	1,882,780,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Samarinda	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	4.46 Persen	1,882,780,000	
9.1	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	6 Dokumen	1,882,780,000	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	6 Dokumen	1,882,780,000	
9.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	350,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	350,000,000	
9.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Samarinda	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	350,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Samarinda	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	350,000,000	
9.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Samarinda	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan	1 Dokumen	467,680,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Samarinda	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan	1 Dokumen	467,680,000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pembangunan sarana dan prasarana industri					pembangunan sarana dan prasarana industri			
9.14	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Samarinda	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	510,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Samarinda	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	510,000,000	
9.15	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Samarinda	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Samarinda	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen		
9.16	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Samarinda	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0	-	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Samarinda	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0	-	
9.17	Sub Kegiatan Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Samarinda	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	0	-	Sub Kegiatan Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Samarinda	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	0	-	
9.18	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Samarinda	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	205,100,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Samarinda	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	205,100,000	
9.19	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Samarinda	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	0	-	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Samarinda	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	0	-	
10	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Samarinda	Pelaku usaha Industri yang diawasi	8.19 Persen	360,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Samarinda	Pelaku usaha Industri yang diawasi	8.19 Persen	360,000,000	
10.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Pelaku usaha Industri yang diawasi	310 Pelaku Usaha Industri	360,000,000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Pelaku usaha Industri yang diawasi	310 Pelaku Usaha Industri	360,000,000	
10.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160,000,000	
10.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Samarinda	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	200,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Samarinda	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	200,000,000	
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Samarinda	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	2.90 Persen	672,214,700	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Samarinda	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	2.90 Persen	672,214,700	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11.1	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah data Industri	110 Dokumen	672,214,700	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah data Industri	110 Dokumen	672,214,700	
11.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	119,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	119,000,000	
11.1.2	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	288,214,700	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	288,214,700	
11.1.3	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	265,000,000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	265,000,000	



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

▪ Usulan Masyarakat Bidang Koperasi, UKM dan Industri

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kelurahan yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kecamatan, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi PD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perindustrian, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan bidang koperasi dan UKM di tingkat Kecamatan, yang berjumlah 10 kecamatan, meliputi usulan bantuan mesin/peralatan produksi bagi UKM, pelatihan ketrampilan/bimbingan teknis (Bimtek) dan pendirian Koperasi. Usulan bidang industri meliputi usulan bantuan mesin/peralatan (Revitalisasi), pelatihan ketrampilan/bimbingan teknis (Bimtek) dan fasilitasi industri. Bantuan mesin/peralatan (revitalisasi) dan pelatihan keterampilan/bimbingan teknis (Bimtek) industri, antara lain untuk industri olahan pangan, olahan tahu tempe, kerajinan, perbengkelan dan pengolahan limbah Industri.

Dengan usulan tersebut tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda seperti tersaji dalam Tabel 2.4



Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat melalui Musrenbang
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume Rp.	Catatan
USULAN BIDANG KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Samarinda	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Samarinda	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	Rp. 21.000.000,-	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Samarinda	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		



Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume Rp.	Catatan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	SAMARINDA	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Rp. 17.000.000,-	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Identifikasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda terhadap kebijakan nasional maupun provinsi disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Telaahan Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
A.	NASIONAL		
1.	Modernisasi koperasi dan penciptaan wirausaha baru.	Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024	
2	Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan Global.	Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024	



No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
3.	Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional	Lampiran Permendagri Nomor 40 Tahun 2020	
B.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1.	Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan UKM diarahkan pada upaya peningkatan Jumlah RAT, peningkatan keterpaduan, pembinaan dan pengawasan, serta pelatihan manajemen	RENSTRA Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim Tahun 2024 - 2026	
2.	Peningkatan daya saing UKM diarahkan pada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui melalui fasilitasi, dorongan pengembangan kreasi/inovasi, pengembangan produksi, peningkatan pasar dan akses informasi dan pemanfaatan teknologi	RENSTRA Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim Tahun 2024 - 2026	
3.	Peningkatan standardisasi produk diarahkan pada upaya penerapan dan pengawasan, serta pembinaan kepada IKM	RENSTRA Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim Tahun 2024 - 2026	
4.	Peningkatan pengembangan industri kecil menengah diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi serta dukungan semua pihak	RENSTRA Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026	

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau



kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian berdasarkan rumusan misi beserta indicator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

TUJUAN :

1. Meningkatnya Kewirausahaan Baru
2. Meningkatnya Pembangunan Sektor Tersier

SASARAN :

1. Menumbuhkan dan Memberdayakan Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya Pembangunan Industri

INDIKATOR KINERJA :

1. Peningkatan Koperasi Sehat
2. Peningkatan Pelaku Kewirausahaan
3. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi program teknis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda di Tahun 2026 adalah :

I. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota



- 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupten/kota

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota
 - 1.1. Sub Kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
 - 1.2. Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



1. Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - 1.1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (termasuk DAK non fisik)

V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.
 - 1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 - 1.1. Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
 - 1.2. Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
 - 1.3. Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro
 - 1.4. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
 - 1.5. Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil



- 1.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
- 1.7. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 1.8. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
- 1.9. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
- 1.10. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan.

VII. Program Pengembangan UMKM

1. Kegiatan pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
 - 1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
 - 1.2. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
 - 1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
 - 1.4. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

VIII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - 1.3. Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 - 1.4. Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.



- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (DEKRANASDA)
- 1.6. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- 1.7. Sub Kegiatan Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- 1.8. Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
- 1.9. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

IX. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota

2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
 - 2.2. Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

X. Program pengelolaan system informasi industri nasional

3. Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).



- 3.2. Sub Kegiatan diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas
- 3.3. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Selain program teknis, juga ada program non teknis yaitu program yang digunakan untuk menunjang kinerja setiap bidang dalam melaksanakan program teknis Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Program non teknis antara lain:

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 4.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 4.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 4.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 4.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- 4.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 5.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
- 6.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6.4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7.7. Sub Kegiatan Penyediaan bahan material
- 7.8. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 7.9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
- 7.10. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 8.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 8.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8.5. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 8.6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8.7. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 9.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 9.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 10.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 10.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- 10.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 10.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 10.5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 10.6. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 10.7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 10.8. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 10.9. Pemeliharaan/ Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Secara lengkap, penjelasan mengenai program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Samarinda yang akan dilaksanakan disajikan dalam tabel 3.1



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					19,932,035,872.00				21,933,787,056.00
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Kota Samarinda	85.25	15,918,450,386.00	APBD	P	85,50	14,263,247,056.00
2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda	64.00	256,882,000.00	APBD	P	65,00	250,000,000.00
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Samarinda	5	145,488,000.00	APBD	P	11	75,000,000
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	0	47,581,000.00	APBD	P	1	75,000,000
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Samarinda	4	46,074,000.00	APBD	P	4	50,000,000



2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	1	17,739,000.00	APBD	P	1	50,000,000
2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	13	10,794,289,879.00	APBD	P	13	11,958,184,773.00
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Samarinda	45	9,648,055,663.00	APBD	P	45	10,689,938,557
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	40	1,098,246,216.00	APBD	P	40	1,218,246,216
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	7	47,988,000.00	APBD	P	7	50,000,000
2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kota Samarinda	10	100,000,000.00	APBD	P	5	50,000,000.00
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Samarinda	10	100,000,000.00	APBD	P	5	50,000,000
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	13	410,529,707.00	APBD	P	13	277,207,973.00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunn kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2	14,759,000.00	APBD	P	2	14,759,000



2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2	124,957,500.00	APBD	P	2	90,907,500
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Samarinda	5	37,648,000.00	APBD	P	5	37,648,000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Samarinda	4	31,813,900.00	APBD	P	4	30,813,900
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Samarinda	3	13,052,000.00	APBD	P	3	13,052,000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	30	188,299,307.00	APBD	P	20	90,027,573
2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Kota Samarinda	13	224,738,142.00	APBD	P	13	90,738,142.00
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Samarinda	0	-	APBD	P	0	-
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Samarinda	2	224,738,142.00	APBD	P	1	90,738,142
2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda	13	1,608,966,768.00	APBD	P	13	1,188,966,278.00
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Samarinda	82	739,619,808.00	APBD	P	82	739,619,808
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Samarinda	5	869,346,960.00	APBD	P	5	449,346,470



2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pemeliharaan	Kota Samarinda	13	2,523,043,890.00	APBD	P	13	448,149,890.00
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Samarinda	2	250,000,000.00	APBD	P	2	100,000,000
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Samarinda	0	-	APBD	P	0	-
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Samarinda	2	199,161,890.00	APBD	P	1	100,161,890
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Samarinda	3	2,073,882,000.00	APBD	P	1	247,988,000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Kota Samarinda	2.12	82,602,750.00	APBD	P	2.12	150,000,000.00
2.17.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	Kota Samarinda	8	82,602,750.00	APBD	P	8	150,000,000.00
2.17.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kota Samarinda	8	82,602,750.00	APBD	P	8	150,000,000



2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Kota Samarinda	9.95	118,321,126.00	APBD	P	19.91	200,000,000.00
2.17.03.2.01	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian</i>	<i>Kota Samarinda</i>	129	118,321,126.00	APBD	P	258	200,000,000.00
2.17.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberikan pembinaan penguatan kelembagaan	Kota Samarinda	0	-	APBD	P	129	100,000,000
2.17.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Samarinda	129	118,321,126.00	APBD	P	129	100,000,000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Kota Samarinda	8.47	311,495,000.00	APBD	P	9.52	450,000,000.00
2.17.04.2.01	<i>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan</i>	<i>Kota Samarinda</i>	32	311,495,000.00	APBD	P	36	450,000,000.00
2.17.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Kota Samarinda	16	123,835,000.00	APBD	P	18	250,000,000
2.17.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kota Samarinda	16	187,660,000.00	APBD	P	18	200,000,000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Kota Samarinda	19.84	199,261,000.00	APBD	P	19.84	920,540,000.00
2.17.05.2.01	<i>Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian</i>	<i>Kota Samarinda</i>	75	199,261,000.00	APBD	P	75	920,540,000.00



2.17.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Samarinda	75	199,261,000.00	APBD	P	75	920,540,000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Kota Samarinda	7.72	330,370,000.00	APBD	P	19.98	597,578,000.00
2.17.06.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah SDM yang sadar berkoperasi</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>100</i>	<i>330,370,000.00</i>	<i>APBD</i>	<i>P</i>	<i>259</i>	<i>597,578,000.00</i>
2.17.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Kota Samarinda		-	APBD	P	50	100,000,000
2.17.06.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Samarinda	100	330,370,000.00	APBD	P	100	200,000,000
2.17.06.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Kota Samarinda		-	APBD	P	50	100,000,000
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda		-	APBD	P	59	197,578,000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan wirausaha	Kota Samarinda	5.27	648,748,125.00	APBD	P	5.27	1,400,000,000.00
2.17.07.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</i>	<i>Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>10,285</i>	<i>648,748,125.00</i>	<i>APBD</i>	<i>P</i>	<i>2,650</i>	<i>1,400,000,000.00</i>
2.17.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Kota Samarinda	3,000	131,698,375.00	APBD	P	300	150,000,000



2.17.07.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitas kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	Kota Samarinda	1,150	106,786,000.00	APBD	P	300	250,000,000
2.17.07.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kota Samarinda	2,385	83,862,500.00	APBD	P	300	150,000,000
2.17.07.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kota Samarinda	1,700	124,557,750.00	APBD	P	300	150,000,000
2.17.07.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Samarinda		-	APBD	P	100	100,000,000
2.17.07.2.01.0009	Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Kota Samarinda		-	APBD	P	100	100,000,000
2.17.07.2.01.0012	Sub Kegiatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Samarinda		-	APBD	P	50	50,000,000
2.17.07.2.01.0013	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Samarinda		-	APBD	P	100	100,000,000
2.17.07.2.01.0014	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kota Samarinda	2,000	201,843,500.00	APBD	P	1000	250,000,000
2.17.07.2.01.0015	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Samarinda	50	-	APBD	P	100	100,000,000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Kota Samarinda	0.60	371,658,750.00	APBD	P	0.60	550,000,000.00
2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skla usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	Kota Samarinda	400	371,658,750.00	APBD	P	300	550,000,000.00



2.17.08.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Samarinda	360	236,702,000.00	APBD	P	200	350,000,000
2.17.08.2.01.0006	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Samarinda	40	134,956,750.00	APBD	P	100	200,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Kota Samarinda	4.41	1,327,081,610.00	APBD	P	4.46	2,402,422,000.00
3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	4	1,327,081,610.00	APBD	P	5	2,402,422,000.00
3.31.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Kota Samarinda	1	167,248,000.00	APBD	P	1	200,000,000
3.31.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kota Samarinda	1	289,104,375.00	APBD	P	1	300,000,000



3.31.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Kota Samarinda	1	292,358,000.00	APBD	P	1	750,000,000
3.31.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kota Samarinda	1	578,371,235.00	APBD	P	1	1,077,422,000
3.31.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Kota Samarinda	0	-	APBD	P	1	75,000,000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Kota Samarinda	8.05	229,877,875.00	APBD	P	8,19	400,000,000.00
3.31.03.2.01	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pelaku usaha Industri yang diawasi</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>305</i>	<i>229,877,875.00</i>	<i>APBD</i>	<i>P</i>	<i>310</i>	<i>400,000,000.00</i>



3.31.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kota Samarinda	1	130,161,125.00	APBD	P	1	200,000,000
-------------------	---	--	----------------	---	----------------	------	---	---	-------------



3.31.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kota Samarinda	1	99,716,750.00	APBD	P	1	200,000,000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Kota Samarinda	2.64	394,169,250.00	APBD	P	2,90	600,000,000.00
3.31.04.2.01	<i>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Informasi Industri</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>100</i>	<i>394,169,250.00</i>	<i>APBD</i>	<i>P</i>	<i>110</i>	<i>600,000,000.00</i>



3.31.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Samarinda	1	146,016,000.00	APBD	P	1	200,000,000
3.31.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kota Samarinda	1	187,532,375.00	APBD	P	1	300,000,000
3.31.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kota Samarinda	1	60,620,875.00	APBD	P	1	100,000,000

Samarinda, Agustus 2025

**Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda**

Jusmaramdhana Alus, SH, MSi.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 sebagai acuan berisi program dan kegiatan/sub kegiatan serta pagu indikatif.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satu Bidang dengan bidang yang lain, maupun bidang dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda termasuk dalam salah satu urusan pilihan pada bidang urusan Pemerintahan Kota Samarinda, berdasarkan rancangan akhir RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2026 serta hasil usulan masyarakat melalui *Musrembang maka rumusan rencana kerja dan pendanaan Program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda* dapat dilihat pada tabel 4.1 :



Tabel. 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda
Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian				21,933,787,056.00	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Kota Samarinda	85,50	14,263,247,056.00	
2.17.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai AKIP</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>65,00</i>	<i>250,000,000.00</i>	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Samarinda	11	75,000,000	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	1	75,000,000	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Samarinda	4	50,000,000	
2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	1	50,000,000	
2.17.01.2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>13</i>	<i>11,958,184,773.00</i>	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Samarinda	45	10,689,938,557	



2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	40	1,218,246,216	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	7	50,000,000	
2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kota Samarinda	5	50,000,000.00	
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Samarinda	5	50,000,000	
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	13	277,207,973.00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunn kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2	14,759,000	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda	2	90,907,500	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Samarinda	5	37,648,000	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Samarinda	4	30,813,900	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Samarinda	3	13,052,000	



2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	20	90,027,573	
2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Kota Samarinda	13	90,738,142.00	
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Samarinda	0	-	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Samarinda	1	90,738,142	
2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda	13	1,188,966,278.00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Samarinda	82	739,619,808	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Samarinda	5	449,346,470	
2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pemeliharaan	Kota Samarinda	13	448,149,890.00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Samarinda	2	100,000,000	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Samarinda	0	-	



2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Samarinda	1	100,161,890	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Samarinda	1	247,988,000	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Kota Samarinda	2.12	150,000,000.00	
2.17.02.2.01	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>8</i>	<i>150,000,000.00</i>	
2.17.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kota Samarinda	8	150,000,000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Kota Samarinda	19.91	200,000,000.00	
2.17.03.2.01	<i>Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>258</i>	<i>200,000,000.00</i>	
2.17.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberikan pembinaan penguatan kelembagaan	Kota Samarinda	129	100,000,000	



2.17.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Samarinda	129	100,000,000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Kota Samarinda	9.52	450,000,000.00	
2.17.04.2.01	<i>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan</i>	Kota Samarinda	36	450,000,000.00	
2.17.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Kota Samarinda	18	250,000,000	
2.17.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kota Samarinda	18	200,000,000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Kota Samarinda	19.84	920,540,000.00	
2.17.05.2.01	<i>Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian</i>	Kota Samarinda	75	920,540,000.00	
2.17.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Samarinda	75	920,540,000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Kota Samarinda	19.98	597,578,000.00	
2.17.06.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah SDM yang sadar berkoperasi</i>	Kota Samarinda	259	597,578,000.00	
2.17.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Kota Samarinda	50	100,000,000	



2.17.06.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Samarinda	100	200,000,000	
2.17.06.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Kota Samarinda	50	100,000,000	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	59	197,578,000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan wirausaha	Kota Samarinda	5.27	1,400,000,000.00	
2.17.07.2.01	<i>Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</i>	<i>Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina</i>	Kota Samarinda	2,650	1,400,000,000.00	
2.17.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Kota Samarinda	300	150,000,000	
2.17.07.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	Kota Samarinda	300	250,000,000	
2.17.07.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kota Samarinda	300	150,000,000	



2.17.07.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kota Samarinda	300	150,000,000	
2.17.07.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Samarinda	100	100,000,000	
2.17.07.2.01.0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Kota Samarinda	100	100,000,000	
2.17.07.2.01.0012	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Samarinda	50	50,000,000	
2.17.07.2.01.0013	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Samarinda	100	100,000,000	
2.17.07.2.01.0014	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kota Samarinda	1000	250,000,000	
2.17.07.2.01.0015	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Samarinda	100	100,000,000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Kota Samarinda	0.60	550,000,000.00	
2.17.08.2.01	<i>Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil</i>	<i>Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi</i>	<i>Kota Samarinda</i>	<i>300</i>	<i>550,000,000.00</i>	
2.17.08.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Samarinda	200	350,000,000	



2.17.08.2.01.0006	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Samarinda	100	200,000,000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Kota Samarinda	4.46	2,402,422,000.00	
3.31.02.2.01	<i>Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Kota Samarinda	5	2,402,422,000.00	
3.31.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Kota Samarinda	1	200,000,000	
3.31.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kota Samarinda	1	300,000,000	
3.31.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Kota Samarinda	1	750,000,000	



3.31.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kota Samarinda	1	1,077,422,000	
3.31.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Kota Samarinda	1	75,000,000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Kota Samarinda	8,19	400,000,000.00	
3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku usaha industri yang diawasi	Kota Samarinda	310	400,000,000.00	
3.31.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kota Samarinda	1	200,000,000	

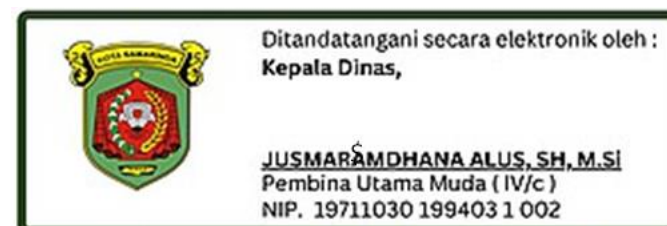


3.31.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kota Samarinda	1	200,000,000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Kota Samarinda	2,90	600,000,000.00	
3.31.04.2.01	<i>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Informasi Industri</i>	Kota Samarinda	110	600,000,000.00	
3.31.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Samarinda	1	200,000,000	



3.31.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kota Samarinda	1	300,000,000	
3.31.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kota Samarinda	1	100,000,000	

Samarinda, Agustus 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1960F-2025-16-60-100-14



BAB V

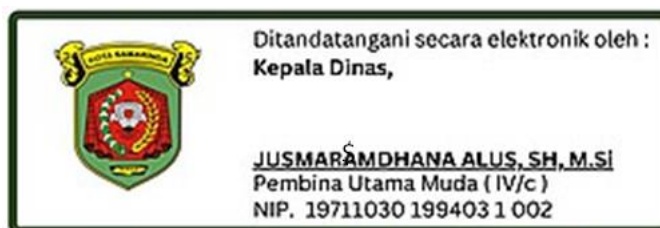
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026, diharapkan Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja SKPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja OPD 2026 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan/sub keguatan dapat memberikan hasil (*Outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Samarinda.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Samarinda, Agustus 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1960F-2025-16-60-100-14